

SIARAN PERS

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

No. 24/339/Dkom  
SP 92/DHMS/OJK/XII/2022

## Bulan Fintech Nasional, 1,5 Juta Masyarakat Berpartisipasi dan Dapatkan Edukasi *Fintech* dari Pemerintah, Asosiasi, dan Pelaku Industri

Edukasi keuangan dan perlindungan konsumen menjadi semakin krusial di tengah perkembangan *fintech* Tanah Air

**Yogyakarta, 12 Desember 2022** – Pemerintah Indonesia, asosiasi, dan pelaku usaha keuangan digital (*fintech*) terus konsisten mendorong edukasi *fintech* yang diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 yang sukses mengedukasi lebih dari 1,5 juta masyarakat.

Diawali dengan gelaran 4<sup>th</sup> Indonesia Fintech Summit (IFS) – forum pertemuan para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku *fintech* lokal dan mancanegara, BFN 2022 yang berlangsung selama sebulan penuh mempertemukan para penggiat *fintech* dari berbagai negara di luar Indonesia melalui serangkaian webinar. 4<sup>th</sup> IFS dan BFN 2022 menjadi kelanjutan dari rangkaian program edukasi dan diskusi tahunan, di mana tahun ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mengusung tema '*Moving Forward Together: The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability*'.

Dalam sambutannya, **Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate** mengungkapkan, “Penurunan aliran pendanaan *start-up* digital di wilayah Asia mencapai 60% *year-on-year* dan 33% *quarter-to-quarter* pada triwulan ke-III tahun 2022. Meski demikian, nilai transaksi sektor *fintech* Indonesia, dengan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Performa unggul ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia.”

“*Fintech is here to stay with a bright future, terlepas dari tech winter*. Dengan CAGR sebesar 15% tahun 2022 hingga 2027 prognosinya, nilai transaksi sektor *fintech* global diperkirakan mencapai USD28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik ini turut dialami atau diproyeksikan oleh sektor *fintech* Indonesia. Nilai transaksi kotor/*gross transaction value* sektor *digital payment* berada di kisaran USD266 miliar dan diproyeksikan akan mencapai sekitar USD431 miliar pada 2025 dengan CAGR 17%,” lanjut Johnny.

“Dalam merealisasikan potensi tersebut, pelaku sektor *fintech* perlu terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multipihak, dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan terwujudnya ekonomi digital nasional yang aman, diadopsi oleh SDM yang cakap, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan, menuju Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju,” kata Johnny.

**Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada perhelatan tersebut** menyampaikan apresiasi kepada regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPi) 2025 yang begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia. Atas hal tersebut, dalam Presidensi G20 2022, dunia telah mengakui transformasi digital Indonesia. Dalam Presidensi tersebut, terdapat kesepakatan *cross border payment*, sehingga diperkirakan enam tahun ke depan pembayaran antar negara akan semakin erat, cepat, murah dan aman. Selain itu, telah disepakati desain konseptual untuk Central Bank Digital Currency (CDBC) untuk mendorong transaksi *cross border* serta inklusi keuangan yang mendukung UMKM, kaum muda dan perempuan. “Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. *Let’s digitalize Indonesia for better future,*” pungkask Gubernur Perry.

Lebih lanjut, Gubernur Perry menegaskan 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu; i) **Satu bahasa** layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat; ii) **Satu bangsa** melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis kluster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non bank untuk berkompetisi secara global; iii) **Satu nusa** melalui 3i yaitu interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN; iv) Pembentukan **market conduct dan pricing policy** untuk persaingan industri sehat; 5) **Digital rupiah** yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Saat ini BI tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi *wholesaler* untuk Rupiah Digital ini.

**Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Mirza Adityaswara** mengatakan, “Pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan tersebut tentunya harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal.”

Kebijakan tersebut untuk memastikan *level playing field* di sektor jasa keuangan dan meminimalisir *regulatory arbitrage* di sektor jasa keuangan serta dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya tahan. Kebijakan ini sesuai dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 lalu, di mana pemimpin negara G20 sepakat bahwa transformasi digital merupakan salah satu agenda penting yang harus terus ditindaklanjuti implementasinya.

Sebagai bukti nyata keseriusan OJK dalam mendukung sektor keuangan digital, pada rangkaian BFN, OJK telah menyelenggarakan dua agenda *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para profesional di bidangnya. Tema pertama yang diangkat, yakni *Framework for Responsible Artificial Intelligence*, di mana diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menerapkan *OECD AI Principles*. Selanjutnya, untuk dapat membuka peluang peningkatan pemanfaatan *fintech* bagi masyarakat, dilaksanakan pula *FGD Aggregator: A great way to boost financial Inclusion*.

**Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata** mengatakan, “Program Bulan Fintech Nasional berupaya mengarusutamakan berbagai isu di sektor *fintech* agar masyarakat semakin familiar dengan ragam *fintech*, manfaat, serta risikonya. Dari antusiasme masyarakat, kami melihat BFN menjadi katalisator dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain edukasi, program ini menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan *fintech* Indonesia. Kami percaya, peluang *fintech* kedepannya semakin tidak terbatas pemanfaatannya telah diaplikasikan di hampir setiap aktivitas konsumsi masyarakat. Kami berharap, BFN dapat hadir kembali dengan dampak yang semakin signifikan untuk masyarakat.”

Pada kesempatan yang sama, **Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Sunu Widyatmoko** menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini menjadi wujud nyata komitmen asosiasi dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH. Presidensi G20 Indonesia secara spesifik telah mengakui peran *fintech* sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional melalui teknologi digital di *fintech lending* dapat menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat *unbanked* dan *underserved*.

“Wujud nyata keberadaan *fintech lending* bagi perekonomian nasional bisa dilihat dalam hal pembiayaan UMKM misalnya, *fintech lending* mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman (*borrower*). Ini menjadi bukti kontribusi positif *fintech lending* dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Bersama penyelenggara kami siap berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk turut memperkecil kesenjangan (*gap*) kredit sektor UMKM,” ungkap Sunu.

Rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, di mana terdapat peningkatan partisipasi sebesar 36% dibandingkan partisipasi tahun lalu, dengan partisipasi aktif meningkat dari tahun lalu menjadi 23.121 pendaftar melalui virtual platform [www.fintechsummit.co.id](http://www.fintechsummit.co.id) selama rangkaian BFN yang dilakukan secara online di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang mencakup partisipasi dalam melihat, menyaksikan, dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1.5 juta peserta.

\*\*\*

Narahubung media:

**Erwin Haryono**

Kepala Departemen Komunikasi  
Bank Indonesia

Telepon: 021-131

Email : [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id)

**Darmansyah**

Direktur Hubungan Masyarakat  
Otoritas Jasa Keuangan

Telp. (021) 29600000;

Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)

**Rizky Pratama**

*PR & Communications Specialist*  
Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH)

Telepon: +62 8111708870

Email: [rizky.pratama@fintech.id](mailto:rizky.pratama@fintech.id)



**Gledys Sinaga**

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia  
(AFPI)

Telp: 08170773077

Email: [gledys@afpi.or.id](mailto:gledys@afpi.or.id)

## Tentang Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional

Indonesia Fintech Summit (IFS) ke-4 adalah program unggulan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 yang bertujuan untuk mempertemukan para pendiri *fintech* lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk membahas topik industri dan peraturan terkini, mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan ini secara konsisten diselenggarakan oleh regulator dan asosiasi industri sejak 2019. Program ini juga didukung oleh berbagai Instansi/Kementerian Lembaga, asosiasi industri dalam ekosistem layanan keuangan digital, serta mitra-mitra internasional seperti World Bank Group, Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), serta Asian Development Bank. Pada tahun ini, 4th IFS 2022, akan diselenggarakan di Bali, pada 10-11 November 2022.

Indonesia Fintech Summit merupakan program unggulan Pekan Fintech Nasional yang bertujuan untuk mempertemukan para pendiri *fintech*, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan stakeholder lainnya baik lokal maupun internasional untuk membahas topik industri dan regulasi terkini, jaringan, serta merumuskan strategi advokasi atau aksi percepatan digitalisasi di industri jasa keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi. Acara ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan AFTECH. Program summit ini telah menjadi acara unggulan industri *fintech* sejak tahun 2019 yang didukung oleh kementerian, asosiasi industri, serta mitra internasional seperti World Bank Group, Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dan Asian Development Bank.

Lebih lanjut tentang IFS, silakan kunjungi situs: [www.fintechsummit.co.id](http://www.fintechsummit.co.id)

## Tentang Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH)

Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada 9 Agustus 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor S-2/D.02/2019. Saat ini AFTECH memiliki 335 Anggota Tetap yang mewakili perusahaan *fintech* dan 15 Anggota Kehormatan, yang mewakili institusi keuangan dan perusahaan teknologi. Untuk informasi lebih lanjut tentang AFTECH, lihat <https://www.fintech.id> dan kunjungi kami di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram dan YouTube.

## Tentang Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.

Di dalam Fintech P2P Lending sendiri terdiri dari tiga jenis penyelenggara pendanaan online, yakni Fintech P2P Pendanaan Produktif, Fintech P2P Pendanaan Multiguna dan Fintech P2P Pendanaan Syariah. AFPI dibentuk dari kesadaran bahwa harus ada perlindungan bagi para pengguna layanan Fintech P2P Lending, baik peminjam maupun pemberi pinjaman.

AFPI menyiapkan Posko Pengaduan Layanan Pendanaan Online yang dapat diakses dengan menghubungi call center di 150 505 (bebas pulsa) di jam kerja, Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB, juga email: [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id). Website: [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id).